



DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

Pemkot Targetkan Rombak 21 Instansi

YOGYA (KR) - Rencana perombakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal direalisasikan tahun ini. Totalnya mencapai 21 instansi yang akan dirombak secara bertahap. Tahap awal menyentuh empat instansi seiring dituntaskannya regulasi menyangkut Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Keempat instansi tersebut ialah perubahan nomenklatur Dinas Keterampilan (Dintib), pembentukan Dinas Pariwisata (Dispar), pembentukan Dinas Kebudayaan (Disbud), serta penggabungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Landasan hukumnya sudah diselesaikan akhir tahun lalu dan kini tinggal menunggu jawaban dari Pemda DIY," ungkap Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, Senin (25/1).

Seluruh perombakan itu menyesuaikan tingkat kebutuhan. Kris memaparkan, perubahan nomenklatur Dintib merupakan perintah dari undang-undang. Sedangkan pembentukan Dispar dan Disbud merupakan arahan dari Gubernur DIY guna memisahkan urusan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Hal ini seiring perubahan beban kerja seiring Undang-undang Keistimewaan.

Sementara penggabungan ULP dan LPSE menjadi badan secara mandiri lantaran akan dijadikan percontohan nasional. Selama ini kedua bidang yang menangani layanan pengadaan barang dan jasa tersebut merupakan badan *ad hoc* meski kewenangannya di bawah koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang). Percontohan itu tidak sekadar kelembagaan, melainkan menyangkut sistem yang akan disinkronisasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Sudah ada kesepakatan bersama antara walikota dengan LKPP untuk percontohan nasional. Tidak bisa dipungkiri, LPSE Yogya penggunaannya tidak hanya instansi pemkot namun juga sektor lain seperti Magelang, rumah sakit, hingga perguruan tinggi," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya optimis perombakan di empat instansi tersebut bakal mendapat persetujuan dari Pemda DIY. Sedangkan perombakan terhadap 17 instansi lain dibagi dalam dua tahapan prioritas. Masing-masing prioritas kedua dengan delapan instansi dan prioritas ketiga dengan sembilan instansi. Kedua tahapan prioritas itu pun landasan hukumnya sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016.

Dari 17 instansi itu, di antaranya meliputi perubahan urusan di Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kantor Kesatuan Bangsa, Kantor Keluarga Berencana serta urusan penanggulangan kebakaran. Seluruhnya berdasarkan kebutuhan yang sudah cukup mendesak. Pihak dewan selaku regulator pun sudah memberikan dukungan sehingga diputuskan tahapan prioritas guna memudahkan perombakan.

(Dhi) -k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bas. Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005